

Judul : DPR: Mutakhirkan Data Si Penerima, Agar Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendorong pemutakhiran data penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pemutakhiran data ini penting untuk memastikan bantuan sosial yang digelontorkan ke masyarakat kurang mampu benar-benar tepat sasaran.

Agar Bantuan Sosial Tepat Sasaran

DPR: Mutakhirkan Data Si Penerima

ACE bilang, tujuan bantuan itu untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan bantuan perekonomian masyarakat, penerima bisa jauh lebih meningkat dan sejahtera.

"Jadi jangan sampai bantuan habis di modal saja. Tentu kebijakan yang pro masyarakat ini akan terus kita dorong, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera," ucap anggota Fraksi Golkar ini.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq. Menurutnya, langkah awal sekaligus kunci dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yakni terus aktif dalam hal validasi data.

"Karena itu masyarakat perlu aktif dan mendukung proses validasi data tersebut," kata Maman.

Maman menuturkan, Pemerintah melalui Kemensos telah

berusaha agar penerima bantuan sosial ini bisa benar-benar tepat sasaran. Dia pun mengajak masyarakat melapor ke Command Center Kemensos jika tidak terdata sebagai penerima bantuan.

"Komisi VIII DPR akan terus mendukung Kemensos dalam meningkatkan program bantuan. Bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga program pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga berharap bantuan sosial ini mampu menjangkau masyarakat penderita difabel atau berkebutuhan khusus.

Maman pun menceritakan, punya tetangga difabel kemudian dibikin yang namanya *green house*.

"Dia setiap hari memelihara cabe dan *offlaker*-nya itu. Dia bisa jualan sehari sampai 10 kilogram dan dia bangga. Jadi,

tidak ada kata berhenti untuk menghadapi hidup ini kecuali dengan kata semangat," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan pentingnya koordinasi antara kementerian/lembaga yang lebih intensif dalam pembaharuan data penduduk miskin. Ke depannya, program-program bantuan Pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengurangi angka kemiskinan.

"Memang perlu koordinasi yang lebih intens menyangkut data penduduk miskin dan juga data program-program kesejahteraan, termasuk dari Kemensos," katanya.

Menurutnya, ini termasuk di dalamnya terkait data yang menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Penerima Bantuan Iuran yang ternyata sampai saat ini belum sinkron. "Artinya, ada klaster

yang perlu ruang perbaikan bersama," jelasnya.

Diah lalu menyoroti persoalan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, angka kemiskinan di Kulon Progo masih di angka 16,39 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 18,39 persen.

"Meski lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun masih jauh di atas tingkat kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,57 persen pada September 2022," ujarnya.

Untuk mengatasi kemiskinan di Kulon Progo ini, Diah menilai harus ada upaya kerja sama oleh kementerian/lembaga terkait. Salah satunya, menentukan variabel kemiskinan dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada di masyarakat.

"Yang banyak dikeluhkan daerah itu masalah variabel kemiskinan. Karena kondisi masyarakat itu dinamis, mungkin parameter, kriteria, variabel mungkin juga berubah ya dalam perkembangan sosiologi masyarakatan," ujarnya.

Dia bilang, Pemerintah Daerah perlu mengkomunikasikan kriteria kemiskinan ini kepada Pemerintah pusat. Apalagi masing-masing daerah memiliki kultur berbeda. Dia berharap, ada variabel kemiskinan yang jelas dan sesuai keadaan masyarakat.

Dengan begitu, akan tercipta data kemiskinan yang bisa menjadi rujukan dalam penyaluran program-program ke masyarakat.

"Misalnya, pendataan masyarakat miskin dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengedepankan kearifan lokal," pungkas dia. ■ KAL